

# Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun

Doni Putra Utama<sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup>*Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, doni@polibatam.ac.id, Indonesia*

**Abstract.** This research is a causality study with the title "Effect of Government Internal Control Systems and Employee Competence on the Performance of Government Agencies in Karimun Regency." The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the Government's Internal Control System on the performance of Karimun Regency government agencies, and to determine the effect of employee competence on the performance of Karimun Regency government agencies. Data collection using a questionnaire where the questionnaire contained questions about the Government's Internal Control System, employee competencies and agency performance. Data were tested using multiple linear regression statistical tests. Based on the results of the study, it can be concluded that governmental internal control system has a significant positive effect on Government Agency Performance with the results of statistical tests that show a sig value of  $0.016 < 0.05$  (alpha 5%). Employee Competency has a significant positive effect on Government Performance with the results of statistical tests showing a sig value of 0,000.

**Keywords:** Government Internal Control System, Employee Competency, Organization Performance

---

\* Corresponding author. E-mail: doni@polibatam.ac.id

## Pendahuluan

Pada era reformasi ini masyarakat Indonesia mengharapkan agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan yang bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan harus terpenuhi agar terciptanya *good governance*.

Begitu pula halnya dengan Pemerintah Daerah (Pemda), dengan diberikannya otonomi daerah dimana daerah diberikan kesempatan untuk dapat mengelola roda pemerintahannya sendiri sehingga pembangunan di daerah menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.

Dengan dikeluarkannya PP 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diganti dengan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban kepala daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri No. 21 tahun 2011 yang menjelaskan secara eksplisit menuntut pemerintah daerah agar dapat menjelaskan atau mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara lebih rinci, dan daerah diberi hak dan kewajiban dalam mengelola keuangan daerah secara otonom dan bebas namun tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Agar penyelenggaraan APBD dapat berjalan dengan baik dan kemungkinan munculnya tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat sipil negara maka diperlukan suatu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah merupakan topik yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah merupakan faktor yang penting bagi pemerintah daerah untuk, menilai kinerja instansi tersebut berjalan secara efektif dan

efisien sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat dua perumusan masalah yaitu Bagaimanakah pengaruh penerapan SPIP terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Karimun? dan Bagaimanakah pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Karimun?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Karimun. Dan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Karimun.

## Landasan Teori

### *Teori Keagenan (Agency Theory)*

Di dalam pemerintah yang merupakan pihak yang memberikan wewenang menjalankan pemerintahan adalah masyarakat yang diwakili oleh wakil mereka yang duduk di DPR atau DPRD. Sedangkan pihak yang menerima wewenang adalah (agensi) para pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Pusat maupun pemerintahan daerah.

### *Pengendalian Internal*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

### *Kompetensi Pegawai*

Kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu di masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu (SK Mendiknas Nomor 045/U/2002).

### *Penilaian Kinerja Pemerintah*

Menurut Abdul Rohman (2007) kinerja pemerintah daerah adalah “merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi”.

Dua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPIP dan Kompetensi Pegawai dan yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja Instansi Pemerintah.

### Perumusan Hipotesis

Tujuan diterapkannya SPIP oleh pemerintah adalah menurut PP No. 60 Tahun 2008 ada empat (4), yaitu:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. Pengamanan asset Negara/Daerah
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintah sejalan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang meliputi kerangka pengukuran kinerja, pencapaian sasaran kinerja, kegiatan dan indikator, evaluasi dan analisis sasaran kinerja, analisis efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas keuangan. Dalam SPIP kegiatan pengendalian merupakan bagian dari unsur-unsur SPIP. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dan bertanggung jawabkan setiap sumber daya daerah yang dikelola oleh setiap masing – masing instansi pemerintah.

Oleh karena itu dengan adanya penerapan SPIP maka akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah tersebut.

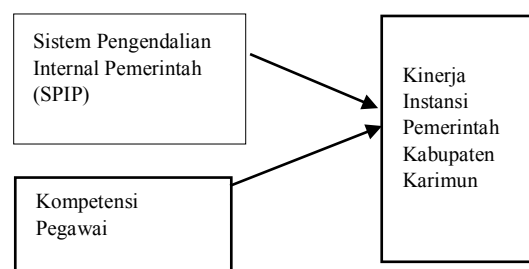
H1: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun.

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang membantu mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan. Sedangkan menurut SK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/KEP/2001, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan,

keahlian dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dari penjabaran definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan dasar seorang pegawai untuk menampilkan tingkat kinerja mereka dalam menjalankan beban tugasnya. Dasar dari kompetensi pegawai adalah dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sehingga tercipta aparatur pemerintah yang memiliki keinginan untuk mengabdikan diri dalam bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan dan akuntabel. Sehingga kinerja instansi pemerintah menjadi optimal karena tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.

H2: Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### Metodologi Penelitian

Penulis berusaha untuk mengumpulkan semua data untuk keperluan analisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat kausalitas. Penulis ingin menggambarkan seberapa besar pengaruh SPIP dan kompetensi pegawai terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Karimun.

Pengukuran untuk setiap variabel merupakan replikasi dari peneliti – peneliti sebelumnya dan telah dimodifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
2. Kompetensi Pegawai
3. Kinerja Instansi Pemerintah

Penelitian ini menggunakan data primer. Data-data tersebut diperoleh dengan teknik survei. Pengolahan data yang digunakan adalah *Likerts Summated Ratings* (LSR). Penelitian ini juga akan melakukan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan statistik data seperti minimal, maksimal, mean, sum, standar deviasi, dan untuk mengukur data dengan skewness dan kurtosis.

Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.

Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter estimasi tidak bias, yaitu uji normalitas residual, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Dilakukan analisis secara simultan maka akan digunakan analisis regresi linear dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Kinerja Instansi Pemerintah
X1	=	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
X2	=	Kompetensi Pegawai
A	=	Parameter Konstanta;
b1,b2	=	koefisien Regresi dari variabel independen
e	=	error term

Adapun penelitian ini juga dilakukan uji koefisien determinasi, uji koefisien regresi dan uji hipotesis.

### Analisis Dan Pembahasan

Objek Penelitian adalah instansi yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang terdiri dari berbagai segi unit kerja berupa perencanaan, pelayanan umum, sekretariat, dan pengawasan.

#### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1  
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100	4.0000	5.0000	4.677692	.3362247
Kompetensi Pegawai	100	4.0000	5.0000	4.653125	.3569272
Kinerja Instansi Pemerintah	100	4.0000	5.0000	4.660000	.3405284
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah (SPSS 22)

Data diolah berdasarkan jawaban dari responden yang berjumlah 100 orang (N=100). Jumlah responden sebanyak 100 orang berdasarkan jumlah kuisisioner yang dikembalikan sebesar 100 kuisisioner dari 127 kuisisioner yang disebar.

Tabel 2  
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-Laki	80	80.0	80.0	80.0
Perempuan	20	20.0	20.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
<b>Umur</b>				
25-35	3	3.0	3.0	3.0
36-45	44	44.0	44.0	47.0
46-55	46	46.0	46.0	93.0
56-65	7	7.0	7.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
<b>Tingkat Pendidikan</b>				
D3	1	1.0	1.0	1.0
S1	32	32.0	32.0	33.0
S2	62	62.0	62.0	95.0
S3	2	2.0	2.0	97.0
SLTA	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
<b>Masa Kerja</b>				
5-14	30	30.0	30.0	30.0
15-24	45	45.0	45.0	75.0
25-34	25	25.0	25.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
<b>Golongan/Pangkat</b>				
III c	12	12.0	12.0	12.0
III d	45	45.0	45.0	57.0
IV a	26	26.0	26.0	83.0
IV b	11	11.0	11.0	94.0
IV c	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data Diolah (SPSS 22)

### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Pada Tabel 3 dapat kita lihat bahwa nilai adalah 0.445 (44.5%), penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen saja maka kita cukup melihat dari nilai Adjusted R<sup>2</sup> saja.

Tabel 3  
Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.675 <sup>a</sup>	.456	.445	.25372	1.947

Sumber Data Diolah (SPSS 22)

### Uji F (F-test)

Tabel 4  
Uji Model ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.184	2	2.592	40.263	.000 <sup>a</sup>
	Residual	6.180	96	.064		
	Total	11.363	98			

Sumber Data Diolah (SPSS 22)

Nilai F<sub>hitung</sub> yang di peroleh adalah 40.263 tingkat signifikansi 0.000. Sedangkan berdasarkan table, tingkat signifikansi 0.005 dengan df 1 = 2 dan df 2 = 97 diperoleh F<sub>tabel</sub> 3.090. Dari penjelasan tersebut dimana F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> (40.263 > 3.090) dan Signifikansi < 0.05 (0.000 < 0.05), maka Ho ditolak.

### Analisis Regresi Berganda

Tabel 5  
Uji Hipotesis (t-test) Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	1.319	.383		3.446	.001		
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Kompetensi Pegawai	.244	.099	.241	2.456	.016	.589	1.697
	.473	.094	.495	5.051	.000	.589	1.697

Sumber Data Diolah (SPSS 22)

Berdasarkan output dari pengolahan data dengan menggunakan SPSS diatas maka jika nilai – nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi

linier berganda maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1.319 + 0.244 X_1 + 0.473 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstansta 1.319
- Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (b<sub>1</sub>) bernilai positif yaitu 0.244.
- Nilai koefisien regresi variabel kompetensi pegawai (b<sub>2</sub>) bernilai positif yaitu 0.473

### Uji Hipotesis (t-test)

Terkait dengan hipotesis H1, pada tabel 5 diperoleh T<sub>hitung</sub> sebesar 2.456 dan signifikansi 0.016, dengan ketentuan signifikansi 0.05/2 = 0.025, df= n-k-1, 100-2-1 = 97, ttabel sebesar 1.985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa.

- T<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub> maka Ho ditolak. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh Thitung > Ttabel (2.456 > 1.985).
- Signifikan < 0.05 Ho ditolak. Berdasarkan perhitungan diperoleh signifikan < 0.05 (0.000 < 0.05) hipotesis H1 diterima.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis H1 diterima.

Sementara terkait dengan hipotesis H2, berdasarkan tabel 5 diperoleh T<sub>hitung</sub> sebesar 5.051 dan signifikansi 0.000. maka berdasarkan tabel, statistic dengan ketentuan signifikansi 0.05/2 = 0.025, df = n-k-1, 100-2-1 = 97, Ttabel sebesar 1.985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- T<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub> maka Ho ditolak. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh T<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub> (5.051 > 1.985).
- Signifikan < 0.05 Ho ditolak. Berdasarkan perhitungan diperoleh signifikan < 0.05 (0.016 < 0.05)

Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis H2 diterima.

### Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh angka penghitungan secara statistic bahwa tingkat signifikansi < 0.05 (0.016 < 0.05) hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan semakin baiknya atau semakin meningkatkatnya

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diterapkan pada setiap instansi pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Karimun maka akan meningkatkan kinerja dari instansi itu sendiri.

Dengan adanya SPIP diharapkan agar tujuan dari masing-masing instansi seperti kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan dapat tercapai.

Oleh karena itu dari kelima komponen SPIP yang ada, penilaian resiko merupakan komponen yang paling penting. Karena penilaian resiko merupakan kegiatan untuk menilai atas kemungkinan terjadinya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Oleh karena itu diperlukan aparatur yang kompeten dan jeli dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko dari tujuan suatu instansi.

#### *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh angka penghitungan secara statistik bahwa tingkat signifikansi  $< 0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh secara signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% dan positif terhadap kinerja instansi Pemerintah.

Aparatur sipil negara (ASN) baik yang dipusat maupun di daerah merupakan komponen yang harus diperhatikan dan dijaga. Oleh karena itu para ASN dituntut untuk memiliki kompetensi yang terus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja ASN itu sendiri maupun kinerja instansi tempat mereka bekerja. Terdapat tiga standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh ASN yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipelajari melalui diklat dan pelatihan, serta kompetensi sikap yang melekat pada seseorang. Sikap merupakan standar kompetensi yang sangat diperhatikan terutama bagi mereka yang menduduki suatu jabatan struktural.

Kebanyakan kasus pidana korupsi terjadi karena sikap para pejabat yang tidak memegang teguh atas amanah yang diberikan. Oleh karena itu berdasarkan hasil uji data tersebut dimana kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi maka dapat diartikan bahwa semakin baik kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik maka kinerja instansi tersebut semakin

baik dan terhindar dari hal-hal tindakan korupsi.

#### **Kesimpulan**

Simpulan dari penelitian adalah sistem adalah sistem pengendalian adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja instansi Pemerintah. Dan Kompetensi Pegawai berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak dilakukannya pengolahan data mendalam yang dikarenakan oleh hasil dari masing-masing dinas atau instansi tidak terlihat dinas mana yang tidak atau paling baik menerapkan SPIP dan memiliki pegawai yang kompeten. Selain itu juga dikarenakan geografi wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari pulau – pulau maka penelitian tidak menjangkau seluruh instansi – instansi yang masuk dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun. Penelitian dilakukan hanya pada di satu pemerintah daerah saja yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, sehingga penelitian ini tidak bisa dibandingkan dengan aparatur pemerintah lainnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Standar Profesi Akuntansi Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- LAN dan BPKP, 2000, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, JAKARTA, LAN.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).
- Priyatno, Duwi, 2014, SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis, Yogyakarta: ANDI.
- Pulungan, Siti Syarah, 2012, Analisis Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Peternakan Dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. [www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- Putri, Gustika Yolanda. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Di Kota Padang. *Journal Article*.
- Rohman, Abdul, 2007, Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah), *Jurnal Maksi*, Vol 7 No 2 Agustus 2007.
- Satgas PP SPIP, 2009, Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP (26 Buku), Jakarta: BPKP.
- Sekaran, Uma, 2006, *Research Methods for Business*, Jakarta, Salemba Empat.